
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 7 NO 1
JANUARI 2021

jrak@plb.ac.id

PREDIKSI PENGARUH PERENCANAAN BIAYA, PENGENDALIAN BIAYA, ANGGARAN BIAYA COVID-19 PADA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Lesi Hertati, Inten Meutia, Rochmawati, Otniel Safkaur, Peny Cahya Azwardi

ABSTRACT

The function of the regional government budget is needed as a guide to determine steps to achieve the goal of realizing a just and prosperous society based on the 1945 constitution. Then the control function is needed to see how the steps have been carried out so as not to deviate from planning, which has been budgeted. Good budget and control functions will be able to create efficiency, in operations that can carry out control of these costs. Regional financial accounting data aims as a control tool. Control is a directing power, so that the purpose of correcting deviations that has been determined is to achieve an efficient and effective goal. Accounting data can be used as a tool for making decisions for local governments appropriately and quickly. For the many types of budgets contained in the regional government of the Covid-19 era, the realization of the Covid-19 cost budget is intended for people to look down to support their economy in the midst of the shock of the Covid-9 outbreak, which is not yet clear when it will end. The budget plays an important role in local government in order to create a just and prosperous society. This research was conducted at the district / city government in South Sumatra. The results show that cost planning, cost control, covid-19 era budget costs affect local government finances to help the economy of the people affected by the Corona Virus. The test tool used is SEM Lisrel, then the method used is this research method is descriptive and verification methods.

Keyword: Cost Planning, Cost Control, Covid-19 Budget in Local Government Finances

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Fokus anggaran dari stimulus terbagi menjadi empat, belanja yaitu di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi, banyak masyarakat yang dalam kelompok kelas menengah menjadi kelompok miskin. Salah satu faktor penting penunjang penganggaran biaya Covid-19 adalah bantuan social bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Baik itu dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnya penghasilan. Tujuannya adalah agar mengurangi beban hidup masyarakat yang hidup dibawah tekanan Corona yang tidak bisa banyak beraktivitas diluar akibat merabahnya penularan Covid-19. Dunia usaha serta pekerjaan banyak yang gulung tikar serta dan perkembangan covid semakin banyak merengut nyawa penduduk dunia tidak memandang siapapun. Diharapkan bantuan pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban hidup perekonomian. Masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hidup yang berhubungan dengan dunia usaha dengan baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan pula dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang selaras dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri.

Penganggaran merupakan perencanaan keuntungan perusahaan untuk periode yang akan datang. Di dalam pelaksanaan anggaran ditetapkan tujuan yang akan dicapai, umumnya dinyatakan dengan jumlah dana yang dianggarkan pemerintah daerah setempat. Sesungguhnya tujuan yang dicapai akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam anggaran untuk menentukan, meneliti, dan menganalisis selisih yang ditimbulkan serta menentukan tindakan koreksi yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang.(Hertati, 2015: Abdul, & Abdullah,2006: Arens, & Randal,2014: Hall.et.all, 2005). Laporan keuangan dalam pemerintah daerah merupakan suatu alat untuk pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi kegiatan pemerintah daerah didalam mengtasi anjloknya ekonomi masyarakat akibat wabah Corona sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk laporan khusus tentang anggaran pemerintah daerah, untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun bagi pihak luar pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah daerah yang berkaitan erat pengatasan wabah Corona yaitu semua SKPD dapat pelayanan bantuan pemerintah dalam pengetasan kemiskinan pangan. Anggaran pemerintah daerah mempunyai peranan aktif dalam berbagai sektor daerah, seperti anggaran pemerintah daerah tentang bantuan sosial. Jenis anggaran pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan seperti UMKM, petani, nelayan yang terdampak Corona.

Ditinjau dari peranan laporan keuangan terkandung didalamnya suatu fungsi yang sangat mutlak keberadaannya yaitu pertanggung jawabannya akan penyajian secara wajar dari informasi-informasi kegiatan yang menangani bantuan perekonomian masyarakat dalam suatu laporan keuangan. Untuk dapat menentukan tingkat kewajiban informasi bantuan perekonomian masyarakat yang terdapat dalam suatu laporan keuangan perlu adanya prinsip-prinsip yang mengatur secara khusus. Pertumbuhan bantuan perekonomian masyarakat dan penduduk guna mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Tak pelak lagi, isu ketidakpastian lingkungan inilah yang sedang dihadapi penduduk diseluruh dunia akibat wabah Corona.

Fenomena menyatakan bahwa sangkarut bantuan dana covid-19 pada anggaran pememrintah daerah akibat terjadinya Covid-19 yang melanda penduduk diseluruh dunia terjadi secara mendadak seperti diungkapkan oleh Jokowi (2020) Selaku Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan persoalan kompleks yang berpengaruh terhadap berbagai lini sektor, salah satunya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen,

dan ini berlaku hampir di semua lapangan usaha (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sehingga, dalam menangani krisis tersebut pemerintah menerapkan Program

Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat krisis. Terkait program JPS, pemerintah membagi menjadi dua jenis yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler. Pertama, bantuan sosial reguler yaitu berupa pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah melalui Menteri Sosial telah mengambil kebijakan bahwa untuk program PKH akan diperluas menjadi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dapat dicairkan setiap bulan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain PKH, Kementerian Sosial juga menaikkan penerima manfaat program sembako yang awalnya 15,2 juta KPM kini menjadi 20 juta KPM dengan indeks RP 200.000 per bulan/per KPM (Sekretariat Kabinet, 2020).

Bantuan sosial non-reguler yang dikhususkan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kehadiran bantuan non-reguler sebenarnya merupakan wujud implementasi dari Keputusan Mensos No 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Bantuan ini terdiri dari dua jenis yaitu bantuan sembako dan bantuan sosial tunai. Bantuan sembako ditujukan bagi warga yang tercatat di Data Terpadu Bantuan sembako untuk masyarakat dengan memberikan bantuan senilai 600 ribu per Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Mensos bahwa “Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali”. Bantuan sosial sebesar 600 ribu tersebut dilakukan dengan dua kali penyaluran per bulan, dimana penyaluran pertama sebesar 300 ribu, kemudian penyaluran kedua 300 ribu sehingga total 600 ribu.

Pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dapat diserahkan pada dinas-dinas terkait yang dapat menangani bidang-bidang yang melayani masyarakat umum. Dengan demikian semua anggaran pemerintah daerah tersebut akan mendapatkan kesempatan besarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan guna mensejahterakan masyarakat. Mengingat anggaran pemerintah daerah merupakan upaya seluruh bangsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang dilaksanakan secara terus menerus, maka hasil-hasil dari anggaran pemerintah daerah tersebut akan dapat dicapai apabila seluruh masyarakat terus berperan aktif dan terus berupaya agar dapat terpeliharanya stabilitas nasional secara seksama. Salah satu faktor yang mendukung anggaran pemerintah daerah agar tetap, beroperasi dengan efisiensi dan memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat adalah kemampuan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian biaya, yang dalam hal ini adalah biaya bantuan masyarakat daerah yang terdampak Corona. (Cohen Paul, 2008: Hertati. Zarkasy. Adam, Umar, Suharman, 2020: Christiaens, Van Peteghem, 2003).

LANDASAN TEORI

Perencanaan Biaya,

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan suatu badan usaha bertujuan untuk mendapatkan laba. Dengan laba yang diperoleh inilah, perusahaan yang bersangkutan akan mampu bertahan (*survive*) dan berkembang (*grow*). Dalam mencapai tujuan tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan perusahaan dengan para bawahannya. Jika perusahaan merupakan perusahaan perorangan/kecil, maka pemilik atau pimpinan perusahaan masih dapat menangani dan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan. Namun bila perusahaan sudah besar dan telah berkembang maka sulit bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan didalam perusahaannya. (Thomson South Western. Harahap,2006: Jan-Erik,2000).

Dalam iklim bisnis perdagangan yang serba kompetitif seperti saat ini, laba menjadi sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Iklim kompetitif mengharuskan perusahaan harus mampu bersaing, dan untuk dapat bersaing maka segala sumber daya yang dimiliki perusahaan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu kriteria efisiensi yang sering dipakai adalah pemborosan, karena apabila pemborosan dapat ditekan seminimal mungkin maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan tingkat efisiensi yang relatif. Efisiensi usaha dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. Pengendalian merupakan salah satu fungsi yang penting dalam kegiatan manajemen, karena melalui kegiatan ini manajemen akan memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana tingkat efisiensi serta efektifitas usaha, disamping menilai sejauh mana kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan diikuti dalam pelaksanaannya. (Laudon & Kene, 2014: Lundqvist, 2001).

Memasuki era globalisasi dewasa ini, setiap perusahaan harus mampu bersaing dalam segala segi, baik mutu maupun harga. Untuk inilah maka perusahaan harus mampu memanfaatkan segala sumber dana dan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kondisi perekonomian dunia yang semakin kompetitif menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh eksternal. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstelasi ekonomi global sedikit banyak akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. (Andi Publisher. Mardiasmo,2002: Nunuy, & Azwari, 2015).

Data dan informasi merupakan suatu alat yang penting guna mencapai tujuan, karena dengan data dan informasi yang jelas, maka manajemen akan dapat membuat suatu perencanaan, mengendalikan usahanya dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen, maka data dan informasi yang dibutuhkan tersebut hendaklah disajikan sedemikian rupa sehingga dapat membantu untuk menilai hasil usaha yang telah lalu dan membantu memformulasikan rencana dimasa yang akan datang, atau membuat keputusan khusus, mengurangi ketidakpastian dan mengurangi resiko memilih alternatif yang salah. Untuk tujuan inilah maka data akuntansi yang disajikan sedemikian rupa, sehingga akan menjadi informasi tentang keadaan keuangan dan hasil usaha yang akan sangat berguna bagi manajemen perusahaan. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, maka akuntansi dapat berperan didalamnya. Sebagai alat bantu manajemen, menurut Heckert (2003), akuntansi berhubungan erat dengan empat fungsi manajemen yaitu :

1. Perencanaan

Suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat keterkaitan data.

2. Pengorganisasian
Manajer dapat menempatkan orang-orangnya dalam struktur formal yang di dalamnya terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajiban atas penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengarahan
Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
4. Pengukuran
Penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati.

Pengendalian Biaya,

Agar tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan dapat terwujud, maka harus direncanakan terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang yaitu berupa anggaran. Disamping itu juga guna kelancaran aktivitas tersebut maka perlu direncanakan pula hal-hal yang menunjang aktivitas tersebut, seperti kebutuhan modal kerja, bahan baku dan lain-lain. Fungsi utama perencanaan menurut "Heckert (2003), adalah merupakan suatu proses yang kontinyu untuk menetapkan kejadian-kejadian dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perencanaan menurut Matz dan Milton (2002), perencanaan yang didasarkan pada analisa alas fakta-fakta yang dikumpulkan, dengan membutuhkan pemikiran reflektif, imajinatif, dan pandangan ke masa depan.(Nunuy & Rahmatika,2014: Ritonga, 2010).

Perencanaan yang tepat dan cermat adalah kunci pokok keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilakukan dengan tepat dan cermat saja tanpa dilanjutkan dengan pengelolaan dan pengendalian yang baik secara terus menerus, tidak akan menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan kerangka fungsional perusahaan yang terkoordinasi serta penetapan wewenang dan tanggungjawab yang tegas pada masing-masing fungsi manajemen. Fungsi tersebut harus mencerminkan adanya pengendalian intern yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan kecurangan dan pemborosan-pemborosan yang dapat mengakibatkan penyimpangan dan rencana semula.(Robbins, & Judge,2014: Solikin, Ikin, 2008: Stamatiadis, 2009).

Pengertian pengendalian menurut "Heckert (2003) Pengendalian dalam pengertian yang paling luas merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran efisiensi atau efektivitas dalam menggerakkan bahan dan tenaga kerja serta sumber meliputi penandingan berbagai jenis norma (*standard*), apakah berupa norma kualitas, waktu ataupun nilai dan kegiatan tersebut secara implisit meliputi pengambilan tindakan yang perlu bilamana terjadi kondisi-kondisi yang menyimpang dari target. Matz dan Milton (2002) menyatakan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu usaha yang sistematis dari manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan rencana. Pengendalian adalah pengukuran efisiensi dan efektivitas dari manajemen perusahaan dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana

atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.(Sulaiman, Si, 2018: Van Beest, Braam, Boelens,2009: Yamin, Kurniawan,2011).

Anggaran Biaya Covid-19

Sebagaimana lazimnya usaha jasa konstruksi, sebelum kontrak kerja ditanda tangani, perusahaan terlebih dahulu menyusun anggaran biaya proyek secara keseluruhan berdasarkan rencana kerja yang diberikan oleh pemberi kerja. Anggaran biaya proyek ini merupakan suatu syarat bagi perusahaan untuk mengajukan penawaran atau tender dalam rangka bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan suatu proyek. Untuk itu penyusunan anggaran harus dibuat berdasarkan teknis dan pertimbangan tertentu, sehingga anggaran dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian. Dalam proses penyusunan anggaran biaya biasanya dikerjakan oleh suatu panitia anggaran yang sering disebut komite anggaran, terdiri dari kepala bagian teknik, kepala bagian, pengendalian operasional, kepala bagian administrasi atau kepala bagian keuangan dan kepala proyek serta kepala pelaksana Setelah anggaran biaya *overhead* disusun, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan terhadap anggaran biaya proyek tersebut. Didalam pelaksanaan anggaran biaya proyek, dalam usaha untuk mencapai efisiensi yang tinggi, suatu perusahaan perlu melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Zarkasyi,2008: Solikin & Ikin, 2008).

Namun perusahaan juga mengalami berbagai masalah baik itu masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah ekstern tidak dapat diramalkan dan dikendalikan oleh perusahaan karena terjadi di luar tanggung jawab perusahaan. seperti perubahan harga, perubahan situasi moneter, dan lainnya. Sedangkan masalah intern seperti adanya pemborosan bahan baku, kurangnya produktivitas tenaga kerja, merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dan dikendalikan oleh manajemen. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki suatu cara yang disebut dengan pengendalian. Meskipun suatu perusahaan telah melakukan perencanaan dengan cermat, namun apabila dalam pelaksanaannya tidak mempunyai pengendalian yang baik, maka perusahaan tidak akan mencapai efisiensi yang tinggi. Dalam hubungannya dengan pengendalian biaya proyek, maka pengendalian yang baik ciri-ciri pengendalian dikatakan oleh Mulyadi (2000) dapat melalui :

1. Pengendalian anggaran.
upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaan tercapai dan anggaran dipakai sebagai patokan untuk menentukan arah. Jadi, dalam pengendalian anggaran, yang dikendalikan bukan anggarannya, melainkan perusahaan. Anggaran hanya merupakan alat belaka
2. Biaya standar
proses akuntansi digunakan untuk mengumpulkan data biaya yang terjadi di masa lalu dan biaya standar.
3. Laporan-laporan kegiatan berkala
bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban.

Keuangan Pemerintah Daerah

Pada umumnya laporan-laporan manajemen mencerminkan sejauh mana pedoman-pedoman yang retain digariskan pimpinan telah terwujud. Laporan adalah penting sebagai suatu media untuk mendapatkan keterangan administratif serta memberikan penuntun bagi manajemen untuk menilai sampai dimana kemampuan pegawainya untuk menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen tersebut adalah yang menyajikan kegiatan operasional perusahaan yang berjalan, sehingga pengendalian manajemen dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan tersebut hanya berguna bagi manajemen apabila dalam laporan tersebut juga dilengkapi dengan analisa antara rencana dengan yang dilaksanakan. (R.G., Harrison, et, all, 2012: Osborne & Gaebler, 1992: O'Brian, James & George. 2010)

Laporan pelaksanaan berkala dapat disusun secara mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kesepakatan manajemen dalam bentuk yang sudah distandarkan dari periode oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan berkala yang disampaikan kepada manajemen, akan menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil sehubungan dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan anggaran. Keputusan tersebut sebagai tindakan perbaikan, sehingga pelaksanaannya operasional akan tetap terkendali ke arah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan semula. Heckert(2003) menyatakan bahwa pertimbangan yang diperlukan didalam membuat laporan pelaksanaan berkala, sehingga laporan tersebut akan dapat sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan adalah: (Nazier, 2009: Mardiasmo, 2007: John Wiley & Sons, 2008).

Laporan pelaksanaan berkala merupakan pelengkap fungsi pengendalian. Dengan adanya laporan ini dapat diketahui sejauh mana rencana telah dijalankan dan dapat segera melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari yang direncanakan. Dalam suatu perusahaan jasa konstruksi, pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Didalam pelaksanaannya, anggaran yang dipedomi perusahaan masih mengalami berbagai masalah baik itu masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah ekstern tidak dapat diramalkan dan dikendalikan oleh perusahaan karena terjadi diluar tanggung jawab perusahaan, seperti perubahan harga, perubahan situasi moneter, dan lainnya. Sedangkan masalah intern seperti adanya pemborosan bahan baku, kurangnya produktivitas tenaga kerja, merupakan masalah yang harus diatasi dan dikendalikan oleh manajemen. Dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari anggaran.

Untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah maupun swasta, maka peranan anggaran pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang kelanjutan perwujudan masyarakat adil, makmur yang merata sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Salah satu perusahaan Seperti halnya anggaran pemerintah daerah bertujuan melayani masyarakat guna kelangsungan hidup umat manusia yang dilanda wabah Corona. Dengan anggaran pemerintah daerah yang diperolehnya, masyarakat akan dapat bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini maka pemerintah daerah memerlukan data dan informasi anggaran yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dimana informasi anggaran ini akan disajikan oleh Akuntansi. (Madison, 2010: Hertati, 2015).

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh seorang pimpinan perusahaan untuk memonitor semua kegiatan-kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang dipimpinya agar setiap kegiatan tersebut dapat dikendalikannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dengan demikian jelaslah bahwa betapa pentingnya peranan laporan keuangan bagi pemerintah daerah. Sebagai suatu fungsi penyediaan jasa, laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang kuantitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi anggaran pemerintah daerah untuk membantu mereka dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi yang menyangkut anggaran pemerintah daerah tersebut. Sedangkan sebagai suatu sistem informasi, laporan keuangan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data anggaran perusahaan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat dipakai sebagai alat bantu dalam membuat keputusan-keputusannya yang menyangkut perusahaan tersebut. Dengan demikian laporan keuangan bukanlah merupakan tujuan, melainkan merupakan suatu alat berkomunikasi untuk mencapai tujuan tersebut. (Christiaens, 2001: Boynton & Johnson, 2006)

Sebagai suatu kegiatan analisis yang bersifat deskriptif, laporan keuangan akan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi didalam perusahaan dan melalui tahap-tahap pengukuran, pencatatan, penggolongan dan peringkasan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan. Laporan Anggaran akan memuat data-data historis tentang anggaran pemerintah daerah dimasa lalu yang akan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen terhadap anggaran pemerintah daerah yang telah dikelolanya kepada dinas-dinas terkait. (Hertati, Syafarudin, Safkaur. Fery.2020).

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, data historis yang disajikan didalam anggaran juga dapat digunakan sebagai alas perencanaan (*planning*) yang meliputi semua aktivitas manajemen dalam menentukan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang akan ditempuh dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan pemilihan berbagai alternatif alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa mendatang dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi dimasa mendatang. Perencanaan yang disusun oleh anggaran pemerintah daerah sekaligus akan digunakan sebagai dasar untuk anggaran, yaitu menilai hasil guna dan daya guna yang telah dicapai oleh perusahaan. Anggaran yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk anggaran atau ukuran kuantitatif lainnya disebut penganggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka akuntansi mempunyai peranan penting, antara lain berupa penyajian informasi-informasi yang bersifat tendensi atau proyeksi laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu penganggaran sering disebut juga dengan istilah perencanaan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat yang diserang wabah Corona maka harus diperoleh pendapatan masyarakat yang tidak menentu dan bahkan tidak dapat menghasilkan uang guna menopang hidup perekonomian keluarga. (Hertati, Iriadi, Safkaur, Fery, Antasari.R Nazarudin, 2020).

PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari peranan manajemen dalam mengelola keuangan daerah Era Covid-19, untuk itu setiap pemerintah daerah terutama

pemerintah daerah yang cukup besar manajemennya memerlukan suatu sistem yang dapat membantu pihak manajemen melaksanakan bentuk kegiatan atau disebut anggaran pemerintah daerah Era Covid-19. Sistem tersebut digunakan oleh pihak manajemen untuk menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan anggaran. Anggaran perusahaan adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang dapat disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. Anggaran keuangan pemerintah daerah merupakan rencana tentang kegiatan keuangan pemerintah daerah yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi anggaran satu sama lain. Dalam keuangan pemerintah daerah anggaran yang formal merupakan alat yang penting bagi manajemen, walaupun anggaran itu hanya merupakan salah satu dari sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih jelas.

Anggaran sulit untuk ditentukan definisinya, tetapi bila diamati mempunyai beberapa ciri umum, yaitu : (1) Terlebih dahulu ditentukan tujuan dari pemerintah daerah. (2) Dirumuskan program ataupun tindakan yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. (3) Program-program tersebut dirumuskan ke dalam anggaran. Gunawan Adisaputro & Asri Marwan (2002) menyatakan bahwa anggaran (*budget*) adalah pendekatan yang formal dan sistematis dari para pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Supriyono (2001) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Anthony dan Dearden (2000), menyatakan bahwa anggaran adalah rencana manajemen, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun”.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dibuat dalam anggaran berupa taksiran yang dinyatakan dalam suatu ukuran uang atau moneter. Fungsi Anggaran menurut “Anthony dan Govindarajan (2003) antara lain untuk menyesuaikan perencanaan strategic, untuk membantu koordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi, untuk memberikan tanggung jawab kepada manajer guna mengotorisasi jumlah yang dapat mereka gunakan dan untuk memberitahukan mereka yang diharapkan, untuk mencapai kerjasama yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kerja dari manajer”.

Hansen dan Mowen (2004), menyatakan bahwa tujuan anggaran antara lain : mendesain para manajer untuk membuat rencana, memberikan informasi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, membantu penggunaan sumber daya para pegawai dalam menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk evaluasi kinerja selanjutnya, meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

Pada dasarnya proses anggaran merupakan proses negosiasi antara para manajer, dimana setiap manajer akan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran bagiannya masing-masing, sehingga masing-masing manajer akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai realisasi anggarannya. Manfaat anggaran didalam pengendalian manajemen merupakan dasar tolak ukur dalam kegiatan proyek dan sebagai dasar pengukuran prestasi dari masing-masing bagian yang dipimpinnya, sehingga dengan adanya anggaran akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi didalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya anggaran akan membantu para manajer dalam mengkoordinasikan secara keseluruhan sasaran yang telah ditargetkan oleh bagiannya

masing-masing. Dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, salah satu yang digunakan adalah anggaran. Munandar (2001) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Adapun fungsi anggaran menurut Gunawan Adisaputro & Asri Marwan (2002), fungsi anggaran keuangan pemerintah daerah yang pokok adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan (pengendalian) kerja. Dihubungkan dengan fungsi manajemen, khususnya perencanaan dan pengendalian, nampaklah bahwa anggaran keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang erat yaitu berhubungan dengan penyusunan rencana dan memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan (fungsi perencanaan). Anggaran dapat juga dilaksanakan oleh manajemen sebagai alat pengukur realisasi atau prestasi pelaksanaan suatu pekerjaan. Dengan demikian akan diketahui apabila terdapat perbedaan atau penyimpangan antara anggaran keuangan pemerintah daerah dengan realisasinya. Anggaran keuangan pemerintah daerah adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh atau digunakan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

Metode pengumpulan biaya yang digunakan adalah metode pesanan karena pada perusahaan yang bergerak atau kontrak yang biaya-biayanya dikumpulkan setiap pesanan atau kontrak, secara terpisah. Dengan demikian untuk setiap macam pekerjaan atau kontrak yang berbeda-beda tersebut, dapat dibedakan masing-masing, biaya dari setiap pekerjaan atau kontrak.

Anggaran biaya proyek ini merupakan suatu syarat bagi perusahaan untuk mengajukan tender proyek. Untuk tujuan pengendalian biaya proyek maka penyusunan anggaran biaya proyek harus disusun berdasarkan teknis pendekatan tertentu sehingga anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian. Keseluruhan anggaran diatas disebut Anggaran induk (*Master budget*) yang merupakan suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang tak terpisahkan satu sama lain dan saling berhubungan.

Sesuai dengan fungsinya dimana karyawan bekerja, biaya tenaga kerja dapat digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja pabrik, biaya tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi umum. Biaya tenaga kerja pabrik digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang dibedakan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasi atau dapat diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan jasa konstruksi identik dengan penyusunan anggaran tenaga kerja pada perusahaan industri. Penyusunan anggaran tenaga kerja harus disesuaikan dengan struktur rencana laba tahunan, dan karenanya harus bisa menunjukkan jam kerja dan biaya untuk setiap bagian dan untuk jangka waktu tertentu serta untuk setiap jenis produk. Bila penetapan standar waktu dan tingkat upah bisa dilakukan maka pengendalian terhadap penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan proses penyusunan rencana ini maka informasi masa lalu, informasi prospek dimasa yang akan datang akan sangat bermanfaat bagi manajemen, baik informasi yang bersifat eksternal dan informasi lainnya yang akan mempengaruhi perusahaan yang dipimpinya dimasa yang akan datang. Informasi eksternal juga akan menyangkut masalah lingkungan eksternal, antara lain untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan rencana tersebut dikemudian hari akan menimbulkan hambatan-hambattan atau kesempatan-kesempatan pada

keuangan pemerintah daerah didalam mencari laba guna kelangsungan hidup keuangan pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan proses penyusunan rencana ini, pemerintah daerah sudah berusaha menyusun perencanaan biaya sedemikian rupa sehingga akan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai salah satu penyalur biaya Era Covid-19 didalam menangani bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. yang mana berdasarkan aturan yang lazim maka sebelum suatu kontrak kerja ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak perusahaan, maka keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu diharuskan untuk menyusun anggaran biaya proyek secara keseluruhan berdasarkan kepala rencana kerja (bestek) yang diberikan oleh pemberi kerja, yang merupakan suatu syarat bagi perusahaan untuk mengikuti tender.

Perencanaan yang merupakan tahap pertama dalam penyusunan anggaran tidak berjalan dengan baik, karena peran serta bagian-bagian yang lain dalam perusahaan masih dirasakan kurang. Para kepala-kepala bagian jarang sekali terlibat dalam penyusunan anggaran seperti memberikan usulan-usulan untuk penyusunan dari pengendalian anggaran. Para kepala bagian yang lain hanya menerima perkiraan-perkiraan anggaran dari pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala bagian teknik, sehingga pengawasan terhadap anggaran masih dirasakan kurang. Padahal partisipasi para kepala bagian tersebut sangat diperlukan pada setiap sistem penganggaran keuangan pemerintah daerah, terutama dalam memperkirakan penyusunan anggaran. Tanpa adanya partisipasi para kepala bagian tersebut maka penyusunan anggaran tidak akan mendekati kejadian-kejadian yang memungkinkan adanya hal-hal yang tidak terduga dilapangan, dikarenakan penyusunannya hanya berdasarkan alas perkiraan dan pengalaman saja.

KESIMPULAN

Proses penyusunan anggaran biaya Era Covid-19 didalam pendistribusian di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. belum berjalan dengan baik, karena masih ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh kementerian Sosial tanpa melibatkan atau berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam dalam hal pemotongan anggaran, akibatnya setiap bagian yang ada dalam bntuan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional Covid-19 kurang sehingga Menteri Sosial harus bertanggungjawab untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Sebagai akibat anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. yang disusun dengan data yang kurang tepat maka anggaran tersebut kurang dapat dijadikan acuan alat pengendalian biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional sehingga pengendalian biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penyusunan anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. hendaklah berdasarkan kepada data-data teknis yang akurat, sehingga dalam pelaksanaan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional nantinya maka anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan

kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Publisher. Mardiasmo, M. 2002. *Public Sector Accounting*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo, M. 2006. Realization of transparency and public accountability through public sector accounting: A means of good governance. *Journal of Government Accounting*, 2(1), 1-17.
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan, Asri. 2002. *Anggaran Perusahaan*. Edisi kelima Penerbit BPFE : Yogyakarta.
- Adolph Matz dan Milton, F. Usry, 2002. *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian*, edisi kesepuluh. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Anthony, Dearsen dan Bedford, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Kelima, Terjemahan Agus Maulana, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Anggraeny, Dhina 2006. *Analisis Anggaran Biaya Proyek Pada PT. Tiga Putri Sinar Kencana Palembang*, Fakultas Ekonomi : UTP
- Abdul, A.H., Abdullah, S. 2006. Relations and agency problems in local government: An opportunity for budget research and accounting. *Government Accounting Journal*, 2(1), 53-64.
- Arens, A.A., Randal, J.E., Mark, S.B. 2014 *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. 15th ed. England: Pearson Education, Inc.
- Arja, S. (2000), Accountability and Government Performance Measurement. *Journal of Accounting and Finance*, 12(1), 20-39.
- Boynton, W.C., Johnson, R., Kell, W.G. (2006), *Modern Auditing*. 8th ed. USA: Richard D. Irwin Inc.
- BPK. (2015a), Examination Report of 2014 Budget Year. Jakarta: Supreme Audit Agency.
- Cohen, D., Paul, Z. (2008), Economic Consequences of Real and Accrual-Based Earnings Management Activities. New York: New York University Leonard N. Stern School of Business.
- Christiaens, J. (1999), Financial accounting reform in Flemish municipalities: An empirical investigation. *Financial Accountability and Management*, 15(1), 21-40.
- Christiaens, J. (2001), Converging new public management reforms and diverging accounting practices in Flemish local governments. *Financial Accountability and Management*, 17(2), 153-170.
- Christiaens, J. (2007), Governmental accounting reform, evolution of the implementation in Flemish municipalities. *Financial Accountability and Management*, 23(1), 99-111.
- Christiaens, J., Van Peteghem, V. (2003), Governmental account reform: Evolution of the implementation in Flemish munitions. *Financial Accountability and Management*, 23(4), 375-399.

- Darwanis, A., Bakar, U. (2012), Effect of implementation of good governance and government accounting standards on financial information quality. *Postgraduate Accounting Journal Syiah Kuala University*, 6, 1-14.
- Govindarajan, 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hall. Cheng, R., Engstrom, J., Kattelus, S. (2002), Education of governmental financial managers: University collaboration between business and public administration. *The Journal of Government Financial Management*, 51(3), 10-37.
- Hansen dan Mowen, 2004, *Akuntansi Manajemen*. Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hair, J.F. Jr., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., Sartet, M. 2014. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). California: Sage Publication, Inc. Hall, J.A.
- Harun, H. 2009. *Sector Accounting Reform and Public Sector Management in Indonesia*. Jakarta: Jakarta Salemba Empat.
- Hasyim, B.A. (2006), The concept of good governance in the concept of regional autonomy. *Journal of Administrative and Policy Analysis*, 3(1), 1-4.
- Heckert. J.B. Wilson and Campbell, 2003. *Controllorship; Tugas Akuntan Manajemen*, diterjemahkan oleh Dra. Tjintjin Fenix Tjindera, Ak., edisi ketiga. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Hertati. L (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* 6, (8) 12-18
- Hertati.L , Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*. 1 (4) . 193-209
- Hertati.L, Syafarudin.A, Safkaur.O. Fery.I. 2020. Peran Manajemen Perubahan Pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona . *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2). 201-216.
- Hertati.L, Iriadi2 , Safkaur.O, Fery.I., Antasari.R Nazarudin. 2020. Peran Akuntansi Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Akibat Covid-19. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2).182-200
- Hertati.L.Safkaur.O. 2020. Dampak Revolusi Industri 4.0 Era Covid-19 Pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan keuangan* 8 (3), 2020, 503-518.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jan-Erik, L. 2000. *The Public Sector Concepts, Models and Approaches*. London: John Wiley & Sons, Inc. KNKG. 2008. *Concept of Good Public Governance Guidelines*. Jakarta: Issued by: National Governance Policy Committee.
- Jokowi 2020. *Jokowi Kesal Prosedur Penyaluran Bansos Tunai Berbelit-belit*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5021535/jokowi-kesal-prosedur-penyalaran-bansos-tunai-berbelit-belit>
- Khairullah, 2002. *Analisis Anggaran Biaya Proyek*, Fakultas Ekonomi : UTP
- Laudon, Kenneth K.C., & Jane P.Laudon, J.P. 2014. *Management Information System. Managing the Digital Firm*. Fourteenth 14th edition. Boston: Global Edition. Pearson Pearson.
- Lundqvist, K. 2001. *Accrual Accounting in Swedish Central Government*. Swedish: The Swedish Financial Management Authority.

- Madison, B. 2010. *Defining Financial Statements*. Madison: R Chad and Co Publishers.
- Mardiasmo, M. 2002. *Autonomy and Regional Financial Management*. 1st ed. Yogyakarta:
- Mardiasmo, M. 2007. Regional financial management reformation still faced with several difficulties. *Regional Autonomy Journal*, 7(2),1-10.
- Maulana Agus. Asri, 2000. *Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen yang Efektif*, Fakultas Ekonomi : UTP
- Mulyadi, 2000, *Akuntansi Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya* Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta
- Munandar, 2001, *Anggaran Perusahaan*, edisi kesatu, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Nazier, D.M. 2009. *Government HR Preparedness Towards Accountable and Transparent State Financial Management*. Indonesia: National
- Nunuy, N.A., Azwari, P.C. 2015. The effect of the implementation of government internal control systems (GICS) on the quality of financial reporting and the impact on the principles of good governance: A research in district, city, and provincial government in South Sumatra. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 811-818.
- Nunuy, N.A., Rahmatika, D.N. 2014. Factors influencing the quality of financial reporting and its implications on good government. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 111-121.
- O'Brian, James J.A& ., George M. Marakas, G.M. 2010. *Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise*. 15th edition. New York: McGraw-Hill.
- Osborne, D., Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguinsc Book.Perkasa.
- Rekdohadiprojo, Sukanto, 2000. *Manajemen Proyek*, Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- R.G., Harrison, W.T., Horngren, C.T., Thomas, C.W., Suwardy, T. 2012. *Financial Accounting*. 8th ed. South Asia: Published by Pearson Education South Asia Pvte Ltd.
- Ritonga, I.T. 2010. *Regional Government Accounting*. Yogyakarta: UGM Graduate School.
- Robbins, W.A., Austin, K.R. 1986. High quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. *Journal of Accounting Research*, 24, 412-421.
- Robbins, Stephen & ., Judge, Timothy, A.J. 2014. *Essensial of Organizational Behaviour*. Twelfth 12th edition. USA : Pearson Education.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. CV. Alfabeta Bandung.
- Supriyono, RA, 2001. *Akuntansi Manajemen ; Struktur Pengendalian Manajemen* Penerbit YKPN : Yogyakarta
- Stamatiadis, F. 2009. Investigating the governmental accounting reform of the Greek national health system (ESY): Some preliminary evidence. *International Journal of Governmental Financial Management*, 9(2), 73-97.
- Sulaiman, Si. 2018. The Role of Good Government Governance Principles in Enhancing the Performance of Public Organization in Aceh, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 292. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018).
- Solikin, Ikin. 2008. He Effect of Government Accounting Implementation, Quality of Accounting Information and Quality of Regional Government Apparatus on Good Government

- Governance and Its Implications for Financial Performance (Survey of City and District Governments in West Java Province) *Proceedings of the National Business & and Financial Forum Seminar*: 53-70.
- Thomson South Western. Harahap, S. 2006. Critical Analysis of Financial Statements. Jakarta: PT.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. Good governance, new paradigm of development management. *Journal of Development Management*, 30, 20-31.
- Tomiiie, S. 2005. *Information Technology Auditing and Assurance*. 2nd ed. USA.
- Van Beest, F., Braam, G., Boelens, S. 2009. Quality of Fiancial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. *NICE Working Paper* No. 9-108.
- Van Der Hoek, M.P. 2005. From cash to accrual budgeting and accounting in the public sector: The Dutch experience. *Public Budgeting and Finance*, 25(1): 32-45.
- Yamin, S., Kurniawan, H. 2011. *New Generation of Research Data Processing with Partial Least Square Path Modeling: Applications with XLSTAT Software, Smart PLS, and Visual PLS*. Jakarta: Salemba Infotek Publishers.
- Zarkasyi, W. 2008. Good Corporate Governance in Manufacturing, Banking and Other Financial Services Business Entities. Bandung: Alfabeta.
- Zeyn, E. (2011), Effect of good government and government accounting standards on financial accountability. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52-62.